

KEDUDUKAN SEJARAH DI TENGAH ILMU-ILMU LAIN

Oleh: Endang Rochmiatun

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora
IAIN Raden Fatah Palembang

Abstract :

This article discusses the history of the position as "science". As an independent discipline, actually has a history of theories. However, the existing theories in history is typical, in contrast to theory in natural science or even the human sciences themselves. It is strongly associated with the position of the history of science itself, which is in two scientific entities. On one side of the science of history is part of the social sciences, but on the other hand, including the humanities. However, do not reduce the history of science scholarship itself. Theories in the history of science, although a bit slow, continue to evolve with the development of science. Development of theories of the history of science many theories supplied by other sciences, such as sociology, psychology, and literature . However, of all of that, theoretical contributions to the philosophy of history's most prominent science . Development theories are expected to provide a solid base of knowledge of history, so the history of science plays a role in community building in its own way . These theories are also expected to help explain historical events scientifically . This is perhaps the usefulness of historical theories in practice and in theory .

Sejarah Sebagai “Ilmu”

Kedudukan sejarah ditengah-tengah ilmu-ilmu lain sering masih diperdebatkan dan dipertentangkan, apakah sejarah termasuk Humaniora (ilmu-ilmu kemanusiaan) atau termasuk ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini Windscuttle¹ berpendapat bahwa sejarah merupakan disiplin ilmu diantaranya ilmu Humaniora dan ilmu sosial. Menurutnya, sejarah sebagai ilmu mempunyai tiga tujuan yakni ;

1. Merekam kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu
2. Untuk membangun tubuh pengetahuan tentang masa lalu
3. Mempelajari masa lalu melalui disiplin metodologi dengan menggunakan metode (teknik) dan sumber-sumber.

Sejarah sebagai “ilmu” mempunyai metodologi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Langkah-langkah heuristik dan kritik- kritik sumber yang dilakukan adalah metode metode objektif ilmiah yang umum sekali dalam penelitian sejarah. Penelitian sejarah hakekatnya adalah untuk mencari kebenaran dan kebenarannya berdasar pada metode ilmiah/pengetahuan

Pembicaraan mengenai metode ilmiah ini, para ilmuwan seperti Anthoni Gidden maupun Thomas Kuhn mempunyai pendapat masing masing. Kuhn berpendapat bahwa perlu adanya kriteria-kriteria untuk menilai apakah ilmiah atau tidak dalam sebuah generalisasi atau “teori” atau “hukum umum” yang digunakan.

¹ Windscuttle, *The killing of history ; How literacy Critics and Social Theorits are Murdering Our Past*, San Francisco ; Encounters, 1996.

Bagi Ahli filsafat seperti Karl Popper, meskipun sejarah tidak menemukan “hukum-hukum umum”, namun sejarah menerapkan hukum hukum itu. Jika sains atau ilmu-ilmu pengetahuan lain menggunakan kekhususan-kekhususan untuk menarik generalisasi, sebaliknya sejarah menggunakan generalisasi itu untuk menjelaskan kekhususan.

Adapun mengenai filosofi metode ilmiah, Karl Popper membicarakan masalah pembenaran empiris, bahwa bukti ilmiah itu bukan dengan dugaan atau observasi, tetapi teori ilmiah adalah salah satu yang difalsifikasi dan bukannya jenis atau hal hal yang ditetapkan atau diyakini melauai pengamatan dan percobaan. Seperti diketahui kata empiris berasal dari kata Yunani *empeirikos*, artinya *pengalaman*, menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunannya pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman inderawi. Dengan inderanya, manusia dapat mengatasi taraf hubungan yang semata-mata fisik dan masuk ke dalam medan internasional, walaupun masih sangat sederhana. Indera menghubungkan manusia dengan hal-hal konkret-material.

Salah satu tokoh empirisme yakni **David Hume** mengatakan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan, yang memberikan kesan-kesan (*impressions*) dan pengertian-pengertian/ide (*ideas*). Kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman sedangkan ide adalah gambaran tentang pengamatan yang samar-samar yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terefleksikan dalam kesan-kesan yang diterima dari pengalaman. Ia juga menegaskan bahwa pengalaman lebih memberi keyakinan dibandingkan kesimpulan logika atau kemestian sebuah akibat. Jadi gejala-gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat pancaindra.

Berdasarkan teori ini, akal hanya mengelola konsep gagasan inderawi, hal itu dilakukannya dengan menyusun konsep tersebut atau membagi-baginya. Kaum empiris juga menganggap akal sebagai sejenis tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Akal berfungsi untuk memastikan hubungan urutan-urutan peristiwa tersebut padahal hubungan yang demikian itu bersifat kemungkinan belaka dan pengetahuan kita tentang hubungan peristiwa tersebut sesungguhnya berasal dari pengalaman.

Adanya perbedaan ekstim antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial yang lain semula berpangkal pada perbedaan antara sejarah dengan ilmu-ilmu alam yang membagi para sejarawan sendiri ke dalam dua kubu yang berlawanan selama abad ke-19. Sebagian besar dari ahli ilmu sosial cenderung memihak kepada ilmu-ilmu alam karena ingin mempertahankan “kemurniannya” dan melihat sejarah sebagai sains “lunak”. Dalam hal ini “teori” diidentikkan dengan ilmiah.

Teori merupakan unsur yang sangat essensial dalam kajian tentang suatu fenomena, baik pada masa lalu maupun sekarang. Perdebatan sengit, terutama antara aliran empirisme dan idealisme, khususnya mengenai penerapan hukum umum (*general law*) dan teori generalisasi (*generalizing theory*). Menurut golongan idealis, terutama Neo-Kantian seperti Wilhelm Dilthey, Henrich Rickert, Windelband, dan Max Weber serta Neo-Hegelian seperti Benedetto Croce dan R.G. Collingwood, bahwa ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) dan kajian-kajian manusia (*human studies*) termasuk humaniora merupakan jenis-jenis olahan intelektual yang sama sekali berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Dikatakan berbeda karena jika ilmu-ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum umum dan bersifat nomotetik, sedangkan sejarah bertujuan untuk menegakkan dan mendeskripsikan individu dan fakta-fakta unik serta peristiwa-peristiwa yang bersifat ideografik. Ilmu-ilmu alam itu bersifat objektif yang dapat dilakukan dengan berbagai metode observasi langsung maupun ekspresi-ekspresinya. Sedangkan dalam kajian-kajian kemanusiaan, termasuk sejarah bersifat subjektif yang hanya dilakukan atas metode interpretasi dan pemahaman (*Verstehen*).

Menurut kelompok yang anti teori, sejarah teoritis adalah sejarah yang spekulatif dan itu harus diserahkan kepada para ahli filsafat. Selain itu, menurut kelompok anti teori tersebut bahwa kebudayaan manusia begitu kaya dan beragam sehingga memiliki keunikan masing-masing dari setiap tempat dan zamannya. Oleh karena itu, model-model sejarah dan tingkah laku manusia yang dijelaskan secara umum adalah penipuan belaka. Adapun tugas sejarawan adalah merekonstruksi peristiwa-peristiwa serta situasi-situasi menurut keunikan individual dan interpretasi-interpretasi mereka hanya berlaku untuk serangkaian kondisi-kondisi tertentu saja. Tidak ada manfaatnya membuat komparasi situasi-situasi sejarah yang dipisahkan oleh waktu dan tempat.

Lebih keras lagi sikap anti teori itupun dikemukakan David Thomson maupun G.R. Elton. Bagi Thomson bahwa sikap sejarah menurut defenisinya adalah bermusuhan dengan pembuatan sistem (*system making*). Thomson berpandangan seperti ini karena ia adalah pengikut yang tidak menyukai filsafat sejarah spekulatif yang tidak menghargai keunikan gerak sejarah. Pendapat serupa pun dikemukakan oleh Elton bahwa menempatkan sejarah dalam upaya membuat teori-teori adalah sama halnya dengan menempatkan sejarah dalam hubungan yang tergantung pada ilmu-ilmu sosial. Atau para sejarawan teoritis adalah perongrong atau pengganggu otonomi disiplin sejarah. Sebab menurutnya, dalam bentuk yang tidak lemah, sejarah memberikan obat penawar yang paling ampuh terhadap pembentuk-pembentuk sistem (*system builders*) di antara ahli-ahli ilmu sosial yang menawarkan penyelesaian-penyelesaian yang segera serta tidak ragu-ragu dalam permasalahan kehidupan manusia yang sangat kompleks.

Sebaliknya, golongan empiris berpendapat bahwa walaupun terdapat perbedaan dalam metode, sebenarnya harus mampu menunjukkan pengetahuan yang benar dan sejarah pun harus mengikuti aturan yang sama. Mereka mengemukakan bahwa besarnya tuduhan-tuduhan yang merendahkan pendukung teoritis itu hanyalah atas dasar prasangka belaka. Bahkan, kecenderungan-kecenderungan negatif yang dimiliki oleh kaum tradisionalis jika dibiarkan dan tidak terkendali hanya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk serta terjadinya pemiskinan pemahaman sejarah. Selain itu, mereka pun berpendapat bahwa dalam penulisan sejarah itu tidak sepenuhnya dan semuanya menekankan keunikan semata-mata, di mana sejarawan pun membuat kerumuna-kerumunan, seperti membuat kategori, konsep, serta generalisasi dari peristiwa sejarah.

Para teoritis pun beranggapan bahwa tidak ada salahnya studi komparasi itu dilakukan jika memang bermanfaat, seperti penyusunan model-model masyarakat industri, agraris ataupun feodal, teknologis, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak benar pula jika sejarah diorientasikan pada kajian keunikan individual semata-mata, melainkan pada kajian kelompok (kolektif), seperti nasionalitas, budaya, agama, dan komunitas. Sebab dengan memberikan identitas-identitas yang lebih besar akan dapat memberikan arti pada mereka sebagai makhluk sosial. Selain itu, dengan pembentukan teori tidak berarti akan menghapuskan kemerdekaan dan peranan individu, justru dengan pengembangan teori akan mencari solusi untuk menjelaskan kendala-kendala yang membatasi kemerdekaan individu. Sebaliknya, Jika sejarawan mempertahankan suatu fokus eksklusif pada pikiran-pikiran dan perbuatan para individu, seperti yang sering dikaji oleh sejarawan naratif politik atau diplomasi.

Reaksi keras dari teoritis lainnya pun dikemukakan oleh Carl G. Hempel dalam tulisannya, *Explanation and Laws* (1959) dan Christopher Lloyd dalam *Explanation in Social History* (1988) yang mengemukakan bahwa setiap penjelasan dalam sejarah harus dapat diterangkan oleh hukum umum (*general law*) sebab secara metodologis, menurutnya tidak ada perbedaan mendasar antara sejarah dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam sejarah pun bertujuan untuk membuat hubungan-hubungan kausatif (*causative connections*), yaitu penjelasan itu diperoleh dengan menempatkan peristiwa-peristiwa itu di bawah hipotesis,

teori, atau hukum umum. Dengan kata lain, penjelasan itu diperoleh dengan mendeduksikannya dari pernyataan-pernyataan hukum umum. Terlepas dari pro kontra terhadap pernyataan tersebut, adanya kontroversi mendasar antara dua aliran itu berimplikasi pada sedikitnya jumlah teori-teori sejarah yang dihasilkannya.

Sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, sejarah sebenarnya memiliki teori-teori. Namun, teori-teori yang ada dalam sejarah adalah khas, berbeda dengan teori dalam ilmu alam atau bahkan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan itu sendiri. Hal ini sangat terkait dengan posisi ilmu sejarah itu sendiri yang berada dalam dua entitas keilmuan. Pada satu sisi ilmu sejarah merupakan bagian ilmu-ilmu sosial, tetapi pada sisi yang lain termasuk dalam ilmu-ilmu humaniora. Namun, tidak mengurangi keilmiahannya ilmu sejarah itu sendiri.

Teori-teori dalam ilmu sejarah, meskipun agak lambat, terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teori-teori ilmu sejarah banyak disuplai oleh teori ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, dan sastra. Namun, dari semua itu, sumbangan teoritis filsafat terhadap ilmu sejarah yang paling menonjol. Pengembangan teori-teori ini diharapkan dapat memberi dasar keilmuan sejarah yang mantap, sehingga ilmu sejarah berperan dalam membangun masyarakat dengan caranya sendiri. Teori-teori ini juga diharapkan dapat membantu menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah secara ilmiah. Inilah barangkali kegunaan teori-teori sejarah secara praktis dan secara teoretis.

Oleh karena posisi sejarah diantara ilmu sosial dan ilmu humaniora maka sejarawan pun menjadikannya bersifat ganda, hal ini berpengaruh terhadap penggunaan teori-teori yang ia pakai. Teori Hermeneutika atau Teori Penafsiran misalnya, yang awalnya digunakan untuk memahami teks-teks dalam agama. Untuk selanjutnya teori hermeneutika juga digunakan untuk menafsirkan makna-makna dan tindakan-tindakan sosial. Para Hermeneutis pada abad ke-19 berpendapat bahwa mereka menulis sejarah tujuannya adalah memproduksi pikiran atau mental dengan perspektif orang-orang yang hidup di masa lalu. Bahkan para hermeneutis abad ke-20 mengklaim bahwa pendekatan merekalah satu satunya cara yang tepat untuk merenung urusan manusia. Kajian terhadap perilaku manusia tujuannya adalah untuk mencari makna, dan karena didasarkan pada makna maka aktivitas manusia dapat dipahami dari dalam.

Dalam hal ini Hans George Gadamer berpendapat bahwa model yang tepat untuk memahami perilaku manusia adalah dengan cara seperti 'penafsiran teks'. Sependapat dengan ini juga adalah Anthony Giddens, menurutnya dalam ilmu sosial juga terdapat hermeneutika ganda karena ilmu sosial sering memiliki dampak besar terhadap apa yang terjadi pada urusan manusia. Dalam sosiologi contohnya, para sosiolog tergantung pada 'konsep' untuk menghasilkan deskripsi yang akurat dari sebuah proses sosial, dan juga agen secara teratur sesuai dengan teori dan konsep ilmu sosial dalam perilaku mereka, sehingga masing-masing keyakinan dapat mengubah karakternya. Sebagai contoh : Studi ekonomi yang menjelaskan lembaga-lembaga kehidupan ekonomi dalam ketentuan yang diterapkan oleh peserta perusahaan, maka teori ekonomi dan kesimpulan yang dapat ditarik dari itu memiliki pengaruh yang besar terhadap proses ekonomi itu sendiri. Menurut Giddens, untuk membantu mendefinisikan atau menganalisis terhadap masalah sosial dan ekonomi tersebut di atas perlu menggunakan konsep Hermeneutika ganda untuk membangun teori 'refleksifitas'. Menurut Giddens, refleksifitas merupakan komponen penting dari masyarakat kontemporer, yang kadang bisa mengubah dunia sosial. Sebagai contoh pemahaman reflektif dalam masyarakat adalah : Publikasi statistik mengenai perceraian akan memiliki dampak pada angka perceraian. Asumsinya adalah bahwa seseorang dapat mengambil keputusan bercerai karena ia tahu ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Namun demikian sebenarnya yang terjadi adalah hanya faktor kemungkinan, karena bisa jadi faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah karena sifat hubungan antara pasangan, jadi bukan karena adanya statistik.

Adapun masalah mendasar mengenai explanasi atau penjelasan sejarah sebenarnya bertolak dari sikap skeptis² para ahli filsafat sejarah yang mempertanyakan ‘apakah pengetahuan sejarah dapat objektif dan dapat diandalkan (realible). Pertanyaan tersebut datang dari penganut tradisi empiris-positivis yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang ilmu alam sebagai objektifitas dan keterandalan (realibilitas) semua disiplin ilmu. Sejarawan C. Llyod berpendapat pada sebagian ahli sejarah memandang sejarah harus dan dapat seperti ilmu alam dan menuntut dalam hal penjelasan-penjelasan harus lengkap atas dasar-dasar yang objektif. Sedangkan sebagian ahli sejarah berpendapat juga bahwa sejarah itu unik, merupakan diskursus (discourse) sui generis (ilmu khusus tersendiri) karena mempunyai metodologi dan ukuran-ukuran tersendiri, sehingga perlu adanya pemisahan yang tegas antara penjelasan sejarah dengan model penjelasan lain atas dasar yang tidak pasti dan relativis.

Sebagian besar ahli filsafat sejarah analitis (menurut tradisi empiris-positivisme) mencoba memaksakan pengetahuan sejarah itu kedalam suatu formula ‘hukum umum’ (general law) yakni suatu pernyataan dari bentuk kondisi universal yang sanggup dikonfirmasi atau dibantah berdasarkan bukti-bukti penemuan empiris yang sesuai. Salah satu tokohnya adalah **Carl Hempel**, ia berpendapat bahwa setiap penjelasan dalam sejarah harus dapat diterangkan oleh ‘hukum umum’ atau ‘hipotesis universal’. Secara metodologis menurut Hempel penjelasan itu diperoleh dengan cara mendeduksikannya dari pernyataan-pernyataan tentang hukum-hukum umum dan kondisi-kondisi awal. Sebagai contoh ; penjelasan mengenai kejadian dari suatu peristiwa jenis khusus E pada suatu tempat dan waktu tertentu terdiri sebagaimana yang biasa dinyatakan dalam penunjukan sebab-sebab atau faktor-faktor penentu (*determining factors*) dari E. Jadi penjelasan ilmiah dari peristiwa yang dibicarakan itu terdiri dari :

1. Suatu rangkaian pernyataan-pernyataan yang menyatakan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu pada suatu tempat dan waktu tertentu.
2. Suatu rangkaian hipotesis-hipotesis universal, seperti : pernyataan-pernyataan dari kedua kelompok secara rasional dikonfirmasi dengan baik oleh evidensi empiris ; dari kedua kelompok pernyataan itu kalimat yang menyatakan terjadinya peristiwa E dapat dideduksi secara logis.

Adapun tradisi hermeneutika yang menjadi pembela utama pendekatan interpretif menolak kemungkinan suatu unifikasi (atas dasar dasar empiris atau realis) antara ilmu alam dengan ilmu kemanusiaan atau kajian-kajian mengenai perbuatan yakni sejarah dan masyarakat. Karena hakikat manusia hanya bisa dipahami melalui sejarah dan dalam sejarah manusia dapat mengekspresikan dirinya pada waktu yang berbeda-beda. Pengertian hermeneutika erat hubungannya dengan penafsiran teks-teks dimasa lalu dan penjelasan perbuatan pelaku sejarah. Sehingga menjadi tugas sejarawan untuk memahami objek

² **Skeptisisme ilmiah** atau **skeptisisme rasional** adalah posisi seseorang yang mempertanyakan klaim yang kurang memiliki bukti empiris. Dalam praktik, istilah ini biasanya digunakan untuk pengecekan klaim dan teori yang kemungkinan merupakan ilmu semu. Skeptisisme ilmiah berbeda dengan skeptisisme filosofis. Skeptisisme ilmiah menggunakan pemikiran kritis dan pembuktian melalui induksi ketika mencoba melawan klaim yang kurang memiliki bukti. Sedangkan **Logika** berasal dari kata Yunani kuno λόγος (*logos*) yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme (Latin: *logica scientia*) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu padakesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal.

kajiannya dengan cara menafsirkan makna-makna (*meanings*) dari semua peristiwa, proses serta perbuatan keseluruhan masyarakat manusia. Sejarawan menjelaskan bagaimana pelaku sejarah berpikir, merasakan serta berbuat. Dalam usaha mencoba memasuki diri pelaku-pelaku sejarah dan mencoba memahami apa yang dipikirkan, dirasakan dan diperbuat oleh pelaku sejarah itu sejarawan harus juga menggunakan latar belakang kehidupan dengan seluruh pengalaman hidupnya sendiri sehingga ada semacam ‘dialog’ diantara sejarawan dengan sumber-sumber sejarah yang digunakannya. Menurut ahli filsafat sejarah Jerman Hans-Georg Gadamer, masalah ‘pemahaman’ (*understanding*) mempunyai struktur yang disebutnya ‘lingkaran hermeneutik’ yakni hubungan sirkulasi antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Makna yang diantisipasi dari suatu keseluruhan dapat dipahami melalui bagian-bagiannya.

Adapun mengenai sejarah itu ‘*art and science*’, maka sebagai seni sejarah dimasukkan dalam sastra karena penggunaan narasi yang dominan. Ketika narasi sejarah secara populer dipandang sebagai sebuah cabang dari kesusasteraan, karya pokok dari sejarawan adalah investigasi, menemukan apa yang telah terjadi dalam waktu dan tempat. Perbedaan ini tidak hanya dalam tujuan dan metode secara umum dari karya-karya yang murni fiksi, tapi juga untuk sebuah tingkatan dari ilmu pengetahuan umum yang tidak dikembangkan beberapa teknik khusus. Dalam pengertian ini, prosedur dari sejarah ilmiah tidak berbeda dari sistem legal yang dikembangkan secara rasional, kecuali bahwa aturan-aturan evidensi belakangan adalah dibatasi oleh berbagai pertimbangan praktis dan membatasi ketentuan sebuah fakta tunggal atau rangkaian-rangkaian fakta dalam sebuah kasus yang diberikan dan karena itu suatu cakupan yang lebih dangkal daripada mereka yang menghadapi sejarawan.

Sekilas Masalah Obyektifitas Dan Subyektifitas Dalam Sejarah

Seperti diketahui, didalam ilmu-ilmu alam ditandai oleh objek yang indenpenden, dunia fisik, dan adanya cara pemikiran yang standar tentang persoalan subyek. Pemikiran dari ilmu-ilmu alam yang eksak yang merupakan landasan pemikiran bagi ahli-ahli filsafat positivisme untuk menentukan obyektivitas sejarah. Pemikiran subyek dalam sejarah rupanya menunjukkan perbedaan antara satu sejarawan dengan yang lain, misalnya interpretasi yang mungkin berbeda-beda antara mereka itu. Ini berarti bahwa pemikiran sejarah tampak ada unsure subyeknya, karena konsep interpretasi berbeda-beda menurut pemikiran sejarawan. Tetapi demikian ada unsure konstan dalam sejarah yaitu prinsip selektif. Kejadian-kejadian masa lampau sangat banyak sehingga seorang ahli sejarah harus mengadakan seleksi dalam penyusunan cerita masa lampau.

Pengertian sejarah sebagai konstruk dan yang mengkonstruksi atau yang menciptakan konstruk adalah seorang penulis atau sejarawan, maka pengertian tersebut dimaknai ‘sejarah’ dalam arti subyektif.³ Dengan kata lain adalah bahwa hasil rekonstruksi sejarawan dalam sebuah tulisan sejarah merupakan atau memuat unsure-unsur subyek (manusia/penulis/sejarawan). Dalam setiap pengungkapan atau penggambaran mengenai masa lalu oleh sejarawan, pasti akan melewati proses pengolahan dalam pikiran dan angan angan seorang penulis (subyek). Kejadian sebagai sejarah dalam arti objektif atau aktualitas diamati, dialami, atau dimasukkan kedalam pikiran subjek sebagai persepsi tentunya tidak akan bias murni atau jernih namun telah diberi ‘warna’ atau rasa sesuai dengan kacamata atau selera subjek. Artinya kita tidak akan dapat pernah mendapatkan penulisan sejarah yang benar benar objektif, sebab objektif itu sendiri hanya ada dalam peristiwa-nya tersebut.

Mengenai hal ini yakni sejarah adalah konstruksi oleh sejarawan, Profesor Teori Sejarah di University College, Chichester yang bernama Keith Jenkins dalam bukunya *Re-*

³ Sartono Kartidirdjo, *Pendekatan Ilmu Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : Pt Gramedia, 1983) hlm .62

*Thinking History*⁴ mempunyai pendapat yakni, Jenkins mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah bentuk kebenaran, tetapi bidang produksi pengetahuan yang harus didekati sebagai "sejarah pikiran sejarawan," bukan "sejarah pikiran masyarakat masa lalu". Sejarah adalah catatan tertulis seperti yang dirasakan oleh seorang sejarawan. Ini adalah pencarian sejarawan untuk mempelajari apa yang telah berlalu dan mengapa ini adalah penting. Sejarawan bertugas untuk memberi makna masa lalu, sehingga menciptakan sebuah narasi sejarah. Beberapa sejarawan, seperti Keith Jenkins, mempertanyakan narasi ini dan keabsahannya sebagai "kebenaran faktual".

Jenkins mengemukakan gagasan bahwa kemampuan untuk menciptakan sejarah adalah mitos atau sesuatu yang sulit diterima akal. Karena filsafatnya adalah bahwa kebenaran nyata dari masa lalu adalah tak terjangkau. Untuk menjelaskannya, maka seorang individu kemungkinan akan berpikir dan mereka akan mempelajari fakta-fakta apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah. ketika pada kenyataannya pembaca menyerap persepsi sejarawan pada fakta dan dengan demikian hubungan penulis untuk menyajikan kebenaran. Dua sejarawan mungkin melihat fakta yang sama, tetapi kemampuan nalar dan pengalaman mereka telah sangat mungkin mempengaruhi naratif yang sejarawan tulis, dengan kata lain apa yang ditulis sejarawan tergantung dari bagaimana sejarawan tersebut melihat fakta. Akibatnya, pembaca dibiarkan bertanya-tanya tentang masalah "kebenaran".

Jenkins menyatakan juga bahwa "untuk mengendalikan wacana anda sendiri berarti bahwa anda memiliki kekuasaan atas apa yang anda ingini dari sejarah, bukannya menerima apa yang orang lain mengatakan itu. Pandangan ini adalah membebaskan bidang sejarah karena memungkinkan sejarawan untuk dapat mendekonstruksi sejarah lain dan dengan demikian menggabungkan interpretasi mereka dengan diskusi akademik. Sementara itu, sejarawan juga harus mengakui bahwa ada subjektivitas tertentu yang dapat ditemukan pada setiap narasi sejarah.

Jenkins mempunyai pandangan bahwa rekonstruksi sejarah yang telah ada masih memungkinkan untuk direkonstruksi ulang atau bahkan didekonstruksi, oleh karenanya sejarawan masa sekarang memiliki kekuatan untuk mempertanyakan penulisan sejarah dari para pendahulu mereka. Meskipun kebenaran tidak akan pernah akhirnya diciptakan, masing-masing narasi sejarah selalu akan berusaha menyajikan kebenaran sejarah dengan terus selalu melanjutkan pencarian yang lebih baik tentang pemahaman masa lalu.

Jenkins percaya bahwa hasil apapun dari sejarawan harus dilihat sebagai sebuah cerita., yakni sebuah karya sejarah yang mana merupakan hasil pandangan sejarawan dalam memandang sebuah peristiwa masa lalu. Pendapat tentang adanya cara pandang sejarawan terhadap peristiwa masa lalu ini mengakibatkan munculnya perbedaan diantara sejarawan dalam menarasikan peristiwa masa lalu. Ini berarti bahwa sejarawan yang berbeda pasti akan menganggap arti yang berbeda dengan peristiwa sejarah yang sama, dengan kata lain peristiwa yang sama apabila direkonstruksi oleh beberapa sejarawan maka hasil karya mereka akan berbeda beda dalam mengartikan peristiwa tersebut. Sejarah klaim untuk pengetahuan (bukan keyakinan atau pernyataan) - Sejarah Itu membuat wacana itu. Apa yang dapat diketahui dan bagaimana kita bisa tahu, berinteraksi dengan "kekuatan". Bahkan sejarah paling empiris telah menciptakan struktur narasi untuk memberikan bentuk pada waktu dan tempat. *Sejarah tidak pernah untuk dirinya sendiri, melainkan selalu untuk seseorang.*

Adapun penulisan sejarah dapat dikatakan 'subyektif' yakni bila sejarawan atau subyek itu sendiri jelas-jelas hadir didalamnya. Penulisan sejarah kita sebut obyektif apabila hanya obyek penulisan sejarah dapat kita amati. Salah satu cara suatu penulisan sejarah dapat bersifat subyektif yakni bila sejarawan membiarkan keyakinan politik atau etisnya turut

⁴ Keith Jenkins, *Re-Thinking History*, (London ; Routledge, 1991) hlm. 5-26

berperan. Pada prinsipnya permasalahan mengenai subyektifitas seorang sejarawan tidak hanya menyangkut masalah sejauh mana ia dipengaruhi oleh nilai-nilai politis atau etis tertentu saja. Sepertinya para filosof sejarah berbicara mengenai subyektifitas dan obyektifitas dalam penulisan sejarah hanya memperhatikan sejauh mana nilai nilai etis atau politis mempengaruhi seorang sejarawan dalam membuat gambaran gambaran sejarah. Pembicaraan ‘subyektif’ dan objektif disamakan dengan terpengaruh atau tidaknya seorang sejarawan oleh nilai nilai tertentu.⁵ Namun demikian muncul pertanyaan apakah penulisan sejarah yang obyektif pada prinsipnya mungkin dilakukan ? Oleh karena sejak abad ke-19 para sejarawan umumnya berpendapat bahwa penulisan sejarah yang obyektif harus diusahakan, meskipun mereka juga menyadari bahwa hal tersebut akan sulit didapatkan.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung aliran subyektifisme, antara lain adalah :

1. *Alasan Induksi*, yakni dengan jalan induksi kita dapat menyimpulkan bahwa setiap telaah histories baik dari masa silam masa kini dan masa depan bersifat subyektif.
2. *Alasan relativisme*, alasan ini sering diyakini banyak sejarawan akan kebenarannya dengan alasan masuk akal. Menurut J. Romein oleh karena adanya perbedaan antara : masa silam sendiri, bekas bekas yang ditinggalkan masa silam (dokumen, prasasti dll), dan bagaimana kita menggambarkan masa silam itu. Hal tersebut menjuruskan penulisan sejarah menjadi subyektif, karena sumber-sumber yang tersisa dari masa silam pada umumnya merupakan laporan yang ditulis oleh orang orang pada zaman dulu mengenai apa yang mereka anggap penting, sehingga perlu kekritisan seorang sejarawan dalam membaca laporan laporan tersebut untuk menghindari unsure subyektif.
3. *Alasan bahasa*, yakni sifat bahasa yang dipakai oleh sejarawan kadang memaksanya melukiskan masa silam secara subyektif. Terkadang ungkapan ungkapan sejarawan bisa mengandung beberapa penilaian yang mengesankan adanya subyektifitas.
4. *Alasan idealistis*, menurut paham idealisme kenyataan merupakan hasil dari budi manusia termasuk juga dalam kenyataan historis, dan kenyataan itu hanya ada sejauh kita menyadari kenyataan. Tidak akan dapat seseorang sejarawan bisa menulis secara obyektif karena obyektifitas mengandaikan pemisahan antara subyek yang mengetahui dan obyek yang diketahui.
5. *Alasan marxis*, seperti juga kaum idealis kaum marxis pun berpendapat tidak mungkin memisahkan subyek yang mengenal dengan obyek yang dikenal, meski terdapat perbedaan dalam penalaran. Bagi kaum marxis kenyataan itu bukan kenyataan fisik maupun histories yang secara pasif berhadapan di muka kita, namun kenyataan yang bereaksi terhadap sentuhan penelitian kita. Sifat kenyataan social tidak dapat ditampilkan dengan beberapa rumus sosiologis yang obyektif , melainkan baru nampak bila seorang revolusioner mencoba untuk merombak kenyataan social. Sehingga tujuan yang dianut oleh subyek menentukan bagaimana kenyataan menampakkan diri kepada kita. Oleh karena subyek dan obyek tak dapat dipisahkan maka tidak mungkin menulis sejarah sejara obyektif.

Beberapa alasan yang mendukung aliran Obyektifisme, antara lain adalah :

1. Memilih obyek penelitian
2. Alasan seleksi
3. Alasan anti skeptisisme atau anti relativisme
4. Alasan sebab dan musabab
5. Alasan propaganda

⁵ F.R Ankersmit, *Refleksi Tentang sejarah*, Terj. Hlm. 329

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang sering mempengaruhi dalam melakukan langkah interpretasi terhadap sejarah. Dalam langkah interpretasi inilah yang sering muncul terjadinya subyektifitas dalam penulisan sejarah, factor tersebut antara lain adalah:

1. Adanya masalah personal bias, yakni dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa banyak rekonstruksi sejarah dipengaruhi oleh rasa senang atau tidak senang oleh suatu keputusan dari seorang ahli sejarah. Mengenai hal ini Jenkins berpendapat bahwa hasil apapun dari sejarawan harus dilihat sebagai sebuah cerita., yakni sebuah karya sejarah yang mana merupakan hasil pandangan sejarawan dalam memandang sebuah peristiwa masa lalu. Pendapat tentang adanya cara pandang sejarawan terhadap peristiwa masa lalu ini mengakibatkan munculnya perbedaan diantara sejarawan dalam menarasikan peristiwa masa lalu. Ini berarti bahwa sejarawan yang berbeda pasti akan menganggap arti yang berbeda dengan peristiwa sejarah yang sama, dengan kata lain peristiwa yang sama apabila direkonstruksi oleh beberapa sejarawan maka hasil karya mereka akan berbeda beda dalam mengartikan peristiwa tersebut. Sejarah klaim untuk pengetahuan (bukan keyakinan atau pernyataan) - Sejarah Itu membuat wacana itu. Apa yang dapat diketahui dan bagaimana kita bisa tahu, berinteraksi dengan "kekuatan". Bahkan sejarah paling empiris telah menciptakan struktur narasi untuk memberikan bentuk pada waktu dan tempat. *Sejarah tidak pernah untuk dirinya sendiri, melainkan selalu untuk seseorang.*

Tidak dapat dielakkan bahwa masalah personal bias semacam ini akan merupakan hambatan yang serius untuk mencapai dan mempertahankan obyektifitas sejarah.⁶

2. Faktor hukum kepercayaan, dalam kenyataannya sering timbul prasangka yang tidak masuk akal dari terhadap suatu fakta. Kondisi seperti ini juga mempengaruhi pencapaian munculnya obyektifitas dalam sejarah. Sebenarnya dapat saja seorang sejarawan mencapai obyektifitas yakni dengan prinsip seleksi sumber sejarah yang dapat menyaring dan dapat memilih aneka ragam tingkat kebenaran terhadap fakta-fakta yang ada. Mengenai masalah "sumber" baik sumber primer maupun sekunder, Jenkins mengambil pendapat dari EH Carr bahwa sumber hanya bisa menjadi bukti bila digunakan untuk mendukung argumen (interpretasi), meskipun ada, namun itu tetap hanya sebuah atau salah satu dari masa lalu. Jenkins menganggap bahwa gagasan sejarah bertumpu pada sumber utama yakni dokumentasi sebagai upaya untuk memahami kebenaran yang hendak dicapai dan untuk mendapatkan obyektifitas. Meskipun kebenaran tidak akan pernah akhirnya diciptakan, masing-masing narasi sejarah selalu akan berusaha menyajikan kebenaran sejarah dengan terus selalu melanjutkan pencarian yang lebih baik tentang pemahaman masa lalu.
3. Faktor adanya teori-teori dari para ahli sejarah tentang interpretasi, menurut Wals yang dimaksud dengan teori ini adalah teori relative dari jenis yang berbeda-beda dari faktor kausal dalam sejarah. Perbedaan interpretasi ini dilatarbelakangi oleh ideology atau faktor lainnya seperti aliran filsafat. Dalam hal ini Jenkins mengemukakan gagasan bahwa kemampuan untuk menciptakan sejarah adalah mitos atau sesuatu yang sulit diterima akal. Karena filsafatnya adalah bahwa kebenaran nyata dari masa lalu adalah tak terjangkau. Untuk menjelaskannya, maka seorang individu kemungkinan akan berpikir dan mereka akan mempelajari fakta-fakta apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah, ketika pada kenyataannya pembaca menyerap persepsi sejarawan pada fakta dan

⁶ Keith Jenkins. *Ibid.*

dengan demikian hubungan penulis untuk menyajikan kebenaran. Dua sejarawan mungkin melihat fakta yang sama, tetapi kemampuan nalar dan pengalaman mereka telah sangat mungkin mempengaruhi naratif yang sejarawan tulis, dengan kata lain apa yang ditulis sejarawan tergantung dari bagaimana sejarawan tersebut melihat fakta.

Fakta Sejarah Dan Kebenaran Dalam Pengkajian Sejarah

Banyak dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa masa kini tidak ada kaitanya dengan masa lampau. Anggapan ini salah, tanpa disadari bahwa masa kini merupakan akibat dari masa lampau. Bukti bukti yang bisa kita lihat pada masa kini merupakan bukti adanya peristiwa masa lampau. Dengan kata lain yang ada pada masa kini dapat dijadikan sebagai bukti adanya peristiwa dimasa lampau. Dalam ilmu sejarah, bukti merupakan sesuatu yang sangat urgen. Oleh karena itu menjadi tugas seorang sejarawan untuk mencari bukti atas keterangan masa lampau yang akan ditulisnya. Tanpa adanya bukti-bukti sebuah keterangan masa lampau dapat menimbulkan keraguan untuk mempercayai keobjektifitasan peristiwa masa lampau tersebut, karena dianggap hanya berdasar dugaan semata. Oleh karena itu penting bagi sejarawan untuk dapat membedakan antara penulisan sejarah yang didasarkan atas bukti-bukti dan bukannya atas dugaan. Bukti atau keterangan dari sebuah pernyataan tentang masa lalu merupakan landasan pokok dalam merekonstruksi masa lampau dalam keilmuan sejarah.

Seperti diketahui, apa saja yang tersaji dalam sebuah tulisan mengenai sebuah kejadian masa lalu merupakan ‘pernyataan tentang kejadian’ atau biasa disebut dengan ‘fakta’. Kejadian yang telah terjadi pada masa lampau merupakan pengertian sejarah dalam arti objektif karena tidak mungkin diulang atau dialami kembali. Namun demikian bekas-bekas atau jejak-jejak yang ditinggalkannya sebagai sebuah memori bias diungkapkan kembali atau diaktualisasikan. Bentuk pengungkapan kembali inilah yang disebut dengan pernyataan (statement) tentang kejadian masa lalu itu. Oleh karena itu jelaslah bahwa ‘fakta’ sebenarnya merupakan produk dari proses mental sejarawan atau memorisasi. Oleh karena itu pada hakikatnya ‘fakta’ adalah bersifat subjektif yang mana memuat unsure dari subjek (sejarawan).

Fakta sejarah dapat diartikan juga sebagai deskripsi tentang masa lalu. Dengan demikian pengungkapan fakta menjadi hal yang serius dalam rekonstruksi sejarah, karena pengungkapan fakta harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipercayai. Permasalahannya adalah seberapa bisa dipercayainya sebuah pernyataan atau fakta tersebut. Karena kepercayaan terhadap fakta-fakta yang dapat dibenarkan dan mutlak diperlukan dalam pengkajian sejarah pernah diserang oleh ahli sejarah berkebangsaan Amerika C.L Bekker. Ia mengajukan 3 pertanyaan⁷, yakni :

1. Apa sebenarnya yang dinamakan fakta histories.
2. Dimana terdapatnya fakta histories.
3. Bilamana terjadi fakta histories.

Dari dasar pertanyaan di atas dapat dijawab bahwa histories selalu akan dikonstruksi atau disusun oleh peneliti sejarah. Oleh karena itu dimensi mana yang akan digunakan oleh seorang peneliti sejarah akan menentukan jenis fakta yang akan diseleksinya nanti. Untuk itu penggunaan banyak dimensi dalam penggunaan fakta akan menghasilkan sebuah rekonstruksi sejarah yang komprehensif.

Adapun yang dimaksud dengan pernyataan histories adalah pernyataan mengenai fakta fakta histories atau keadaan keadaan pada masa silam. Sedangkan yang dimaksud masa silam adalah keseluruhan keadaan itu dan bukannya pernyataan-pernyataan mengenai keadaan

⁷ F.R Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah* , hlm 99

keadaan, yang mana pernyataan tentang keadaan keadaan tersebut akan berbeda beda karena fakta itu hanya sekali terjadi dan merupakan sesuatu yang unik.

Terdapat dua macam pernyataan tentang masa silam, yakni : - pernyataan mengenai suatu keadaan unik (pernyataan singular), - pernyataan mengenai yang umum terjadi. Pernyataan umum yang dirumuskan oleh seorang ahli sejarah selalu dibatasi oleh keadaan dan waktu . Pernyataan umum tersebut sifatnya : individu atau gejala histories (tokoh gerakan social atau gerakan kebudayaan)

Oleh karena itu pernyataan-pernyataan umum itu merupakan rangkuman dari pernyataan singular yang menghasilkan teks histories. Teks histories merupakan serangkaian pernyataan singular dan juga pernyataan umum mengenai masa silam. Agar teks histories dapat dipercaya maka syaratnya adalah ucapan-ucapan singular tersebut harus 'benar'.

Terdapat empat teori mengenai 'kebenaran' atau apa yang disebut pernyataan itu benar ('p' atau pernyataan benar) yaitu :

1. *Teori tindak bahasa*, menurut teori ini tak ada perbedaan antara pernyataan "p" disatu pihak, dan 'p' itu benar atau benarlah bahwa p' dilain pihak. Para penganut teori ini bersedia menerangkan mengapa dan dalam keadaan apa kata "benar" ingin kita pergunakan. Teori tindak bahasa ini biasa juga disebut dengan teori 'performance'. Namun demikian teks histories dan pernyataan-pernyataan singular histories lebih berpretensi melimpahkan pengetahuan dan tidak hanya melakukan suatu tindak bahasa. Dengan ucapan-ucapan singular seorang ahli sejarah melukiskan masa silam dan tidak bermaksud menunjukkan sesuatu kepada pembaca atau mengingatkan pembaca akan sesuatu yang sudah diketahuinya.
2. *Teori Pragmatis*, menurut teori ini sebuah ucapan benar bila ucapan itu terbukti merupakan pedoman yang dapat diandalkan bagi perbuatan kita. Teori ini mengaitkan penerimaan ucapan dengan hasil dalam perbuatan , bila yang pertama menghasilkan yang kedua maka ucapan itu benar, dan bila tidak maka ucapan itu tidak benar. Namun demikian teori kebenaran pragmatis ini tidak memaparkan perspektif yang menarik bagi pengkajian sejarah.
3. *Teori korespondensi*, teori ini untuk menguji kebenaran bahwa suatu ucapan benar apabila ada atau terdapat keserasian (korespondensi) antara apa yang dinyatakan dalam ucapan itu dengan keadaan yang yang disebut dalam ucapan tadi didalam kenyataan histories.
4. *Teori Koherensi*, menurut teori ini suatu ucapan benar apabila ucapan itu ada kaitanya (ada koherensi) dengan sejumlah ucapan yang kebenarannya sudah diterima. Teori koherensi ini lebih cocok dengan praktek penelitian sejarah, karena sejauh mana pendapat itu serasi (koheren) dengan pendapat-pendapat lain dalam bidang sejarah yang umum diterima, dan ini merupakan tolok ukur yang dapat digunakan oleh peneliti sejarah untuk menentukan pernyataan histories itu benar atau tidak benar. Dengan kata lain pendapat atau konsep histories yang sudah umum diterima menentukan apakah suatu ucapan singular itu dapat dianggap benar atau tidak.

Daftar Pustaka

- Ankersmit, F.R. *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, terj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Berkhofer, Jr., Robert F. *Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York: Free Press, 1969.
- Blum. *The European World a History*. Boston: Little, Brown & Company, 1966.
- Collingwood, R.G. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Dithey, Wilhelm 1962, *Patten and Meaning in History: Thoughts on History and society*, New York: Harper & Row
- Gardiner, Patrick (ed.) 1959. . *Theories of History*. New York: The Free Press,
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*, edited by Jean Delanglez. New York: Fordham University Press,
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, terj. Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press,
- Jenskins, Keith, *Re-Thinking History*, , London ; Routledge, 1991
- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Walsh, W.H. *Philosophy of History: An Introduction* New York: Harper & Row Publishers, 1967.
- Walsh.W. H.1977. *An Introduction to Philosophi to Philosohpy of History*. London Hutchinson.
- Windsuttle, *The killing of history ; How literacy Critics and Social Theorits are Murdering Our Past* San Francisco ; Encounters, 1996.